

Memperkirakan Pendapatan Langsung dan Dampak Berlapis Produksi Film di Yogyakarta

Tito Imanda
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
imanda@gmail.com

DOI:

Article Info Article history: Received 22 Des 2020 Revised 28 Jan 2021 Accepted 27 Mar 2021	ABSTRACT When issuing permits for film production, many provincial officials use the logic of having films to promote their areas as tourist destinations. How, however, do they see the direct economic benefits from these productions? Do they have any idea of how much these benefits amount to, exactly? These questions might not be easy to answer because of the lack of data and relevant research in this topic. Given this dearth of data, this study turns to a qualitative study focusing on producers, and tries to make an estimation of economic income of the locals from film production budget that can be used for further research.. The paper concludes an estimation that at least 50–68% of all films' production budget is spent locally. More precisely, films with a budget of more than IDR 10 billion spend approximately 50% of their budget locally; this increases to 58.5% for mid-range film productions and 68% for lower-budget films (with a budget of IDR 5 billion and lower). Moreover, these films have a multiplier effect, that is, they stimulate further spending and other business transactions. <i>Keywords: film production in regional areas; film multiplier effect; film infrastructure; creative economy; regional cinema</i> ABSTRAK Saat mengeluarkan izin produksi film, banyak pejabat daerah yang berpendapat bahwa film di daerah memiliki tujuan tidak langsung, yaitu mempromosikan daerah sebagai tujuan wisata. Namun, bagaimana mereka melihat bahwa daerah menerima manfaat ekonomi langsung dari dana produksi yang turun langsung di daerah tersebut? Apakah mereka tahu persis berapa banyak manfaat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak mudah dijawab karena kurangnya data dan penelitian yang mendahului dalam topik ini. Karena itu, makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif kepada sekelompok produser, dan mencoba membuat dugaan awal tentang penghasilan masyarakat lokal dari anggaran produksi film yang bisa menjadi pijakan penelitian berikutnya. Penelitian ini menyimpulkan perkiraan setidaknya 50–68% dari semua anggaran produksi film dibelanjakan secara lokal. Lebih tepatnya, film dengan anggaran lebih dari Rp 10 miliar menghabiskan sekitar 50% dari anggaran lokal; ini meningkat menjadi 58,5% untuk produksi film kelas menengah dan 68% untuk film dengan anggaran lebih rendah (dengan anggaran Rp 5 miliar ke bawah). Selain itu, film-film tersebut memiliki multiplier effect atau efek berlapis, yaitu merangsang pembelanjaan lebih lanjut dan transaksi bisnis lainnya. Kata kunci : produksi film daerah; efek berlapis film; infrastruktur film; ekonomi kreatif; sinema daerah
---	---

PENDAHULUAN

Kita membutuhkan penelitian mendalam untuk memperkirakan dampak ekonomi pembuatan film cerita panjang di daerah. Dalam konteks Indonesia, hal ini disebabkan beberapa hal: kurangnya data ekonomi tentang produksi film, akses informasi yang terbatas tentang anggaran produksi, standar anggaran produksi yang bervariasi antar film, dan sebagainya. Mengingat kelangkaan data tersebut, maka studi ini beralih ke studi kualitatif, mewawancarai produser, dan mengamati kegiatan produksi film untuk mendapatkan gambaran situasi. Karena topik ini jarang dibahas dalam konteks Indonesia, maka besar harapan studi ini dapat menginisiasi pembahasan mengenai cara menghitung dampak ekonomi produksi film terhadap masyarakat yang tinggal di daerah syuting. Makalah ini berfokus pada kasus khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya Provinsi Yogyakarta). Hasilnya memperkirakan bahwa setidaknya sekitar 60% atau lebih persisnya antara 50% hingga 68% anggaran produksi film di daerah dihabiskan di daerah tersebut.

Wilayah Jabodetabek tetap menjadi pusat ekonomi industri perfilman Indonesia pasca reformasi, tempat perusahaan film terbesar berada dan tempat para eksekutif film mengadakan kegiatan produksi. Sementara itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan paling signifikan dalam hal pembuatan film dan produksi film. Meski industri film komersial dan infrastrukturnya tetap berorientasi ke Jakarta, dan meski dukungan pemerintah daerah terhadap ekonomi kreatif sering dipertanyakan, film dan sineas menjamur di Yogyakarta. Karya-karya mereka semakin banyak memasuki bioskop komersial dan mendapat pengakuan dari festival film baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Banyak pemilik modal dan perusahaan film dari Jakarta yang berproduksi di Yogyakarta, dengan sineas lokal sebagai operator utamanya. Mengingat jumlah produksi yang tinggi, Yogyakarta menjadi salah satu dari sedikit wilayah di Indonesia yang menyambut baik Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dan inisiatifnya untuk membentuk Komisi Film Daerah (KFD) guna menciptakan suasana yang kondusif untuk produksi film. Pada akhir 2019, BEKRAF digabungkan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi jejak kebijakan-kebijakan mereka masih berlaku hingga saat artikel ini dipublikasikan.

Hasil studi ini akan berguna bagi komisi film daerah dan pihak lain yang ingin memulai produksi film dan membantu mereka meyakinkan pihak berwenang tentang dampak positif lokal dari kegiatan tersebut. Harapan kami, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mendorong komisi-komisi film lokal untuk memelopori kajian yang lebih detail tentang dampak ekonomi produksi film lokal di tingkat lokal.

Studi ini percaya pada hipotesis bahwa produksi film memberdayakan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji potensi dampak langsung pengeluaran produksi film terhadap penduduk lokal di wilayah terdekat dan wilayah setempat yang lebih luas. Meskipun tidak ada cara untuk memprediksi pengeluaran lokal produksi film sebelum terjadi, kami berharap studi ini akan menawarkan cara untuk memperkirakan efek pengeluaran tersebut dan merancang formula untuk menjelaskan potensi film untuk menggerakkan ekonomi lokal.

METODOLOGI DAN TINJAUAN LITERATUR

Pertanyaan penelitian utama untuk studi ini sebagian besar berhubungan dengan pertanyaan tentang "bagaimana" daripada "mengapa", menunjukkan makalah ini bersifat eksploratif. Pertanyaan utamanya adalah: Bagaimana kita bisa memperkirakan dampak ekonomi film di tingkat lokal? Beberapa pertanyaan lebih lanjut diturunkan dari sini: Bagaimana perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pola produksi film dari skala yang berbeda — yaitu, film dengan anggaran lebih rendah, menengah, dan tinggi - serta dalam berbagai aspek anggaran film? Berapa persentase pengeluaran film yang dapat kita asumsikan mencapai penduduk setempat selama produksi film di tingkat provinsi? Sambil melihat adanya pendapatan langsung masyarakat lokal yang terkait dengan produksi, bagaimana kita dapat memperkirakan efek pengganda produksi film terhadap ekonomi lokal?

Meskipun artikel ini membahas banyak angka dan skala, data dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Data kuantitatif tidak dapat segera dikumpulkan, karena sebagian besar produser merahasiakan anggaran produksinya. Karena itu, saya harus bergantung pada beberapa produser yang koperatif. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat kalkulasi ini, saya bertindak sebagai antropolog dan menggunakan observasi partisipan, sebuah metode yang peneliti saya masuk "secara fisik, dan dengan cara lain yang memungkinkan, ke dalam ruang budaya atau dunia kehidupan

yang dimaksud, dan idealnya [menghabiskan] waktu yang relatif lama di sana "(Ortner, 2013: 25, terjemahan). Saya mengumpulkan data dengan berada di lokasi selama pengambilan gambar, mengamati proses, dan mengumpulkan informasi dari wawancara dengan produser, kepala departemen, dan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan jasa yang berbeda, serta dengan mempelajari materi dan dokumen referensi. Di bagian saya fokus menjelaskan kebijakan, saya mendapat keberuntungan untuk mendapatkan akses bertemu dengan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan film, dan dengan demikian dapat mewawancarai mereka.

Pembuatan film di Yogyakarta telah dibahas atau disebutkan dalam berbagai buku dan artikel akademis. Dalam buku *Mapping Filmmakers in Yogyakarta 2015*, Suwanto dkk. menjelaskan bahwa komunitas film lokal telah mengubah cara produksi mereka, membentuk organisasi formal, menggali sumber pendanaan eksternal, dan mengelola sumber daya manusia secara profesional (2015: 55–58). Karena buku ini tidak membedakan antara pembuat film profesional dan amatir, bantuan buku ini terhadap makalah ini menjadi kurang maksimal. Lebih lanjut, buku ini berpendapat bahwa pembuatan film di Yogyakarta terpisah dari pusat industri film di Jakarta (ibid: 59), meskipun pada tahun 2015 beberapa sineas lokal dalam jumlah yang signifikan sudah membuat film di Yogyakarta dengan pendanaan dari perusahaan film yang berbasis di Jakarta.

Tentunya, komunitas film relevan ketika membahas perkembangan pekerja film lokal di Yogyakarta. Katinka van Heeren percaya bahwa reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 turut mendorong kebangkitan komunitas film independen di Indonesia, sehingga melahirkan gerakan film baru. Anak muda Indonesia membuat festival film, forum internet, pertemuan, dan jaringan sendiri, sehingga membentuk saluran baru untuk mendistribusikan dan memamerkan filmnya (2012: 53). Komunitas-komunitas ini mulai mengangkat lokalitas pada saat perusahaan yang berbasis di Jakarta masih berfokus pada konten berorientasi universal (2012: 54). Garin Nugroho, seorang sineas Indonesia terkemuka dari Yogyakarta yang film panjang ketiganya, *Bulan Tertusuk Ilang (... and the Moon Dances, 1995)*, dibuat di Yogyakarta, menyiratkan keterkaitan antara komunitas film lokal ini dengan kegiatan produksi film industri di Yogyakarta. Menulis bersama Dyna Herlina S., ia mengamati bahwa para penggagas komunitas film yang pertama kali berkembang di kampus dan pusat kegiatan kepemudaan di Yogyakarta telah menjadi pembuat film yang mapan di perfilman Indonesia (Nugroho dan Herlina S, 2015: 340–341). Seperti halnya Garin Nugroho, banyak dari mereka memilih syuting film layar lebar di Yogyakarta.

Studi produksi film dan pengaruhnya terhadap ekonomi lokal tidak tersedia secara luas, meskipun data dan kesimpulan tersebut sangat penting untuk mendorong pemerintah daerah menarik produser untuk syuting di daerah mereka. Banyak ahli menghubungkan produksi film dan ekonomi dengan melihat dinamika antara orientasi konten pembuat film (estetika, budaya, politik, dll.) Dan motivasi mereka untuk mencari keuntungan (lihat Komalawati, 2017; Telles, 2020). Beberapa orang melihat film memiliki potensi untuk mendorong pariwisata (lihat Hoffmann, 2015, atau BEKRAF, 2017). Yang lain fokus pada dampak ekonomi langsung dari film, biasanya dengan menghubungkannya dengan pentingnya insentif pemerintah daerah, percaya bahwa kegiatan produksi film memberikan kontribusi positif bagi bisnis dan masyarakat lokal dengan mendatangkan sejumlah besar sumber keuangan eksternal. Salah satu laporan tersebut membahas kegiatan produksi film di Negara Bagian Ohio, menyimpulkan bahwa insentif mengakibatkan produksi film menghabiskan \$ 142 juta secara lokal antara tahun 2014 hingga 2018, dengan 598 karyawan produksi ini mendapatkan penghasilan sebesar \$ 14,2 juta; 496 karyawan tidak langsung lainnya memperoleh \$ 16,6 juta (Pusat Penelitian dan Konsultasi Ekonomi, Universitas Cincinnati, 2018: 25–26; lihat juga Mayer, 2017, dan Klowden et al., 2010).

Dari kelompok studi terakhir, salah satu yang paling penting untuk proyek ini adalah karya Rick Fieldman, yang mempelajari dampak ekonomi dari pembuatan film fitur di wilayah Franklin County, Massachusetts Barat pada 2014–2015. Mengidentifikasi konsekuensi peristiwa ekonomi besar, termasuk upah, pekerjaan, produksi, penjualan, dll sebagai "pengganda" (multipliers) (2015: 9), ia menjelaskan:

“Aliran ini, dari pengeluaran awal sumber daya hingga pengeluaran tingkat kedua dan ketiga, menggambarkan dampaknya, atau yang sering disebut sebagai 'pengganda'. Kelompok pertama memberikan pengeluaran awal dan memiliki efek langsung pada bisnis di daerah langsung dan regional. Bisnis-bisnis yang menerima pengeluaran awal ini kemudian membelanjakan sebagian pendapatannya untuk bisnis lain, menciptakan *efek tidak langsung (indirect effect)*. Mereka yang kemudian dibayar,

yang menjadi pencari nafkah, sekarang memiliki lebih banyak uang di rumah tangga mereka, dan rumah tangga ini sekarang membelanjakan beberapa bagian secara lokal, yang memiliki *efek induksi (induced effect)*." (Fieldman, 2015: 3, terjemahan. Yang dicetak miring adalah penekanan hal penting dari saya)

"Pembuatan film di Massachusetts barat memiliki efek berlapis keluaran (output multiplier effect) total 1,63: untuk setiap \$ 1 yang dihabiskan untuk pembuatan film, \$ 0,63 dihabiskan untuk transaksi bisnis lainnya." (Fieldman, 2015)

Fieldman mengidentifikasi tiga jenis efek: langsung, tidak langsung, dan diinduksi (direct, indirect, dan induced). Ketika sebuah produksi film menghabiskan uang untuk pengeluaran tipikal, termasuk hal-hal seperti gaji, peralatan, persediaan, subkontrak, dan keuntungan, itu memiliki efek langsung. Efek tidak langsung muncul ketika penyedia layanan lokal yang menerima uang ini membelanjakan sebagian dari pendapatan itu kepada pihak ketiga. Kombinasi dari kedua efek ini biasanya menghasilkan peningkatan lapangan kerja, memungkinkan uang mengalir ke rumah tangga, yang kemudian digunakan dalam pengeluaran tipikal: tabungan, investasi, dan pembelian barang dan jasa baru. Ini menghasilkan apa yang disebut Fieldman sebagai efek yang diinduksi. Misalnya, pendapatan penduduk setempat juga berasal dari tambahan orang yang tinggal dan menghabiskan uang di daerah tersebut selama proses pembuatan film, serta dari mempekerjakan penduduk setempat untuk bekerja di area pembuatan film. (Fieldman, 2015: 2).

Secara umum, kita dapat mengasumsikan bahwa efek langsung dan tidak langsung termasuk dalam anggaran film. Namun, untuk beberapa komponen, efek langsung dan tidak langsung terhadap ekonomi lokal hanya relevan terkait dengan penggunaan masyarakat lokal (misalnya biaya kru dan pemain lokal), atau layanan (misalnya, persewaan peralatan atau agen perjalanan). Sedangkan untuk induced effect - yaitu menghitung kontribusi ekonomi rumah tangga yang terkena dampak produksi film- kita harus mewawancarai pihak yang bertanggung jawab, atau mempelajari referensi tentang, komponen tertentu. Uang dari sumber-sumber ini digunakan tidak hanya untuk kegiatan pembuatan film dan gaji, tetapi juga mengalir ke layanan lokal, perusahaan makanan dan minuman, perusahaan ritel (termasuk toko suvenir), hotel, motel, penginapan, losmen atau kos-kosan, pemerintah kota setempat dan layanan mereka, dan agen perekrutan lokal (ibid: 3), dan melihat efek induksi berarti melihat bagaimana semua penghasilan ini memperngaruhi ekonomi rumah tangga lokal.

Fieldman menghitung efek berlapis produksi film dengan menggunakan data statistik resmi dan catatan pajak, mengumpulkan hasil analisis ekonomi dan perangkat lunak pemodelan, mewawancarai pejabat lokal dan pemilik bisnis, dan merujuk studi dan laporan sebelumnya (ibid: 8). Dalam kasus film dan kegiatan terkait film di Yogyakarta, di mana banyak transaksi ekonomi tidak dilaporkan, di mana perusahaan film masih menjalankan bisnis dengan sektor informal (misalnya: perusahaan persewaan mobil perorangan, akomodasi homestay, dan katering berbasis rumah tangga), yang rekaman pajaknya tidak mudah diakses, dan jika produksi film masih dianggap sebagai aktivitas yang tidak direncanakan oleh pejabat pemerintah (yang tidak memiliki program insentif atau unit layanan khusus untuk menarik produser), wawancara dengan pembuat film dan pemilik bisnis terkait film adalah salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi mengenai anggaran dan pengeluaran film. Ini dapat dilengkapi melalui catatan transaksi berbagai produksi selama periode waktu tertentu.

Namun, relatif tingginya jumlah kegiatan produksi film di Yogyakarta membuat sulit untuk mengikuti produksi secara cermat. Keengganan perusahaan film dan bisnis lokal untuk memberikan informasi rinci adalah masalah signifikan lainnya, yang juga dihadapi oleh Fieldman (2015). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang produksi film dan efek penggandanya, penelitian ini menggunakan penilaian dari pembuat film, pemilik layanan, dan literatur yang berbeda dalam upaya untuk mengembangkan formula atau persamaan yang akan memungkinkan kami untuk memperkirakan efek menetes (*trickle-down*) dari produksi film. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan produser dan kepala departemen, serta dengan pemilik bisnis lokal yang relevan, untuk memastikan pengeluaran rata-rata film. Ini juga menggunakan observasi di tempat untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang terjadi selama pembuatan film.

Penelitian untuk artikel ini dimulai dengan menentukan persentase rata-rata komponen anggaran film yang berbeda. Karena membandingkan film anggaran rendah dengan yang mahal tidak akan memberikan perbandingan apel-ke-apel, setelah berkonsultasi dengan produser diputuskan untuk mengenali tiga tingkat produksi film: film anggaran lebih tinggi, dengan anggaran lebih dari Rp 10

miliar; film dengan anggaran menengah, yaitu berbudget antara Rp 5 hingga 10 miliar, dan film anggaran rendah, dengan budget kurang dari Rp 5 miliar. Kategorisasi ini memungkinkan untuk mengidentifikasi efek langsung produksi film di Yogyakarta dengan lebih baik.

Dari situ, penelitian ini melihat pola pengeluaran di beberapa layanan daerah dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala departemen produksi yang berbeda dan pemilik usaha serta dari referensi terkait bidang tersebut. Proyek ini, dengan demikian, memeriksa anggaran rata-rata produk film, dengan fokus khusus pada jenis layanan lokal tertentu: lokasi, transportasi (sewa mobil dan truk), bensin, akomodasi, katering, biaya bakat, dan biaya kru. Persentase rata-rata anggaran yang dibelanjakan untuk setiap layanan, serta arah arus keuangan layanan ini (misalnya, apakah uang masuk ke penduduk lokal atau orang luar) akan memungkinkan kita menghitung potensi dampak produksi film terhadap ekonomi lokal; Dengan kata lain, memungkinkan kita untuk menghitung pengaruh tidak langsung produksi film di Provinsi Yogyakarta. Seperti disebutkan di atas, kalkulasi semacam itu akan membantu komisi film lokal dan pemerintah mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan efek ekonomi dari aktivitas film.

DISKUSI

Tinjauan Kebijakan: Film sebagai Alat Promosi, Penguat Ekonomi, dan Budaya

Ada dua perspektif utama tentang potensi dampak ekonomi film. Yang pertama melihat produksi film sebagai alat promosi, sedangkan yang kedua memandangnya sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan infrastruktur penyedia layanan lokal. Makalah ini condong ke perspektif kedua, dan sisa dari bagian ini akan membahas dinamika kedua perspektif tersebut dari sudut pandang kebijakan, pejabat, dan birokrat terkait.

Kita bisa melihat bahwa kedua perspektif tersebut diterapkan dalam pengembangan komisi film daerah Indonesia (KFD) oleh Badan Film Indonesia (BPI) dan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF). Sampai saat ini, lima komisi daerah telah dibentuk: di Yogyakarta, Bandung, Banyuwangi, Bojonegoro dan Siak (Provinsi Riau). Sepuluh lainnya sudah dalam pembicaraan. Perspektif di atas terbukti dari bagaimana pemerintah daerah memilih kantor mana yang bertanggung jawab atas pengembangan komisi-komisi ini.

Beberapa daerah, seperti Banyuwangi, Siak, dan Bandung (dan, direncanakan, Banda Aceh, Singkawang, dan Jayapura) mendorong dinas pariwisata untuk mengembangkan komisi tersebut, dan ini menunjukkan keyakinan bahwa film dapat menjadi alat promosi bagi orang lain. produk, dan dalam kasus ini, produknya adalah pariwisata. Di Yogyakarta, pengembangan KFD menjadi tanggung jawab Dinas Perekonomian Sekretariat Provinsi, sedangkan di Bojonegoro berada di bawah Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Keduanya meyakini pandangan bahwa produksi film adalah aktivitas ekonomi itu sendiri. Yang penting, perspektif ini saling melengkapi, dan tidak diragukan lagi bahwa setiap komisi film lokal akan menekankan keduanya.

Sedangkan untuk BEKRAF, pihaknya menggagas program komisi perfilman lokal dengan gagasan bahwa film adalah sektor yang kuat dan determinan. Seperti diutarakan oleh Triawan Munaf, Ketua BEKRAF, film "Sebagai produk budaya populer, karya kreatif film memiliki kemampuan menembus pasar global sekaligus menjadi medium sempurna sebagai lokomotif bagi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif lainnya" (Munaf, 2017: 6). Ia memahami film sebagai media yang kuat untuk mempromosikan alam, manusia, dan budaya, dan pada saat yang sama mengakui ini sebagai faktor yang menarik pencari lokasi syuting (ibid.). Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Endah Sulistianti, yang bertugas menangani program komisi perfilman lokal, memahami kedua perspektif tersebut memiliki tujuan pada skala waktu yang berbeda. Sebagai kegiatan ekonomi, produksi film memiliki tujuan jangka pendek untuk mendorong transaksi ekonomi dan layanan lokal. Sedangkan sebagai alat promosi, film memiliki efek jangka panjang yang ia pahami sebagai efek berlapis (Sulistianti, 2017: 7). Seperti telah dijelaskan di atas, pada akhir 2019 BEKRAF telah dilebur

ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan urusan film di kementerian ini saat ini dikordinasikan oleh Direktorat Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi.

Sedangkan sebagai lembaga yang terdiri dari pekerja film, aktivis, dan akademisi, BPI cenderung lebih menonjolkan aspek ekonomi produksi film daripada alat promosi pariwisata. Seperti yang diungkapkan oleh Chand Parwez Servia, Ketua BPI:

"BPI sangat menyadari potensi dampak ekonomi yang ditimbulkan apabila sebuah daerah menjadi lokasi pembuatan film. Selain dapat mempromosikan potensi wisata dan budaya, lebih jauh adalah peningkatan aktivitas ekonomi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung selama dan setelah daerah tersebut menjadi lokasi pembuatan film, termasuk apabila film tersebut diedarkan di daerahnya." (2017: 8).

Kepala Bidang Promosi Lokasi Lalu Roisamri menegaskan bahwa dalam UU Perfilman (UU No. 33 tahun 2009), salah satu peran utama BPI adalah mempromosikan lokasi Indonesia untuk produksi luar negeri. "Perspektif promosi" semacam itu sangat kuat bisa dimaklumi, karena pada saat undang-undang itu dirilis, film diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Namun, jika dipikir-pikir, peraturan daerah dan hubungan kekuasaan membuat pengaturan izin daerah menjadi sulit dan rumit. Memiliki komisi film lokal yang kuat, dikatakan, akan memberikan pembuat film layanan satu atap; Demikian pula, transparansi biaya perizinan akan membuat daerah lebih menarik bagi produser. Apalagi, berdasarkan keterlibatannya dalam masalah ini, ada kalkulasi optimistis bahwa dampak jangka panjang produksi film di suatu daerah bisa mencapai lima kali lipat dari total anggarannya di kawasan tersebut (wawancara, 27 Juli 2019). Dewi Umayu, Wakil Ketua BPI, meyakini bahwa dampak jangka panjang ini terutama didorong oleh infrastruktur yang lebih baik, yang umumnya disiapkan khusus untuk produksi film tetapi juga dapat digunakan oleh penduduk lokal dan calon investor (wawancara, 29 Juli 2019).

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah otoritas lain ketika membicarakan kebijakan soal film. Pada saat pengumpulan data untuk penulisan ini pada tahun 2019, bagian di kementerian itu, Pusat Pengembangan Perfilman, (untuk selanjutnya Pusbang Film) belum dilibatkan dalam program pembentukan komisi film daerah tersebut. Dian Srinursih, Kepala Bidang Perizinan dan Pengawasan Pusbang Film saat itu, menggarisbawahi bahwa tidak ada aturan pasti tentang komisi film lokal, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki masalah untuk terlibat dalam program tersebut (wawancara, 29 Juli 2019). Pusbang Film memang membuat programnya sendiri dengan fokus pada aspek-aspek yang berbeda dari UU Perfilman. Untuk mempromosikan produksi film di daerah kepada calon investor, Pusbang Film telah mengumpulkan data infrastruktur film di seluruh nusantara. Pada awal 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengganti Pusbang Film menjadi Direktorat Film, Musik dan Media Baru, di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Haruskah pemerintah daerah terlibat dalam urusan perfilman? Beberapa pasal dalam UU Perfilman mengatur tentang keterlibatan pemerintah daerah dalam urusan perfilman, yang menyatakan bahwa mereka harus melindungi dan mendukung kegiatan produksi dan apresiasi film. Namun aturan lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sempat menimbulkan keraguan di benak aparat pemerintah daerah. Undang-undang ini memuat lampiran yang merinci pembagian kerja antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi tidak memuat apa pun tentang "perfilman nasional" (Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lampiran V, Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan: 90). Akibatnya, beberapa pemerintah daerah enggan terlibat dalam urusan perfilman, bahkan menolak mengeluarkan izin usaha gedung bioskop, dengan alasan segala sesuatu yang berkaitan dengan film harus melalui kantor pusat di Jakarta yang terkait dengan film.

Hal ini tidak menyurutkan niat Pemprov Yogyakarta untuk mendirikan kantor urusan perfilman sendiri. Kantor ini didirikan pada tahun 2013, pada saat yang bersamaan pemerintah provinsi mulai mengalokasikan dana untuk kegiatan perfilman (Aryanto, 2015: 20–21). Dimulai sebagai bagian dari Dinas Kebudayaan Provinsi, bagian ini dibuat dari bagian kesenian; namun, staf, peran, dan anggarannya tetap ada. Selain itu, keempat kabupaten di Provinsi Yogyakarta kini memiliki meja film sendiri. Saya bertanya kepada Sri Eka, mantan Kepala Seksi Perfilman Yogyakarta, tentang kesiediaan pemerintah Yogyakarta untuk membuka kantor perfilman meski bingung legalitasnya. Sambil tersenyum, ia menjawab singkat, "Karena kami istimewa", merujuk pada fakta bahwa Yogyakarta memiliki administrasi 'khusus' dan tetap diperintah oleh Sultan Yogyakarta yang sudah lama berdiri (percakapan, Agustus 2017). Bagaimana pun, Kantor Sie Film Daerah Istimewa Yogyakarta dilebur

bersama cabang seni lain pada tahun 2019, dan Dinas Kebudayaan Yogyakarta menempatkan kesenian dalam kategori “tradisional” and “kontemporer”. Beberapa program lama Sie Film masih dijalankan oleh divisi kesenian kontemporer.

Namun, ini tidak serta-merta berarti bahwa tugas pembentukan komisi film lokal jatuh ke tangan itu. Sebagaimana disebutkan di atas, komisi perfilman Yogyakarta dikembangkan di bawah koordinasi Dinas Perekonomian Sekretariat Provinsi. Imam Karyadi Aryanto yang bekerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Yogyakarta) menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa keputusan tersebut dilakukan karena Pemprov menginginkan Komisi Film Daerah Yogyakarta berkoordinasi dengan elemen ekonomi kreatif lainnya (wawancara, 7 Agustus 2019). Yang terjadi selanjutnya adalah Yogyakarta — seperti halnya Bandung — memutuskan untuk membentuk komisi film lokalnya murni dari sektor swasta, memilih untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia (layanan dan asosiasi film lokal). Memang, Yogyakarta telah menjadi pilihan penting bagi produser film yang berbasis di Jakarta dalam memilih lokasi pembuatan film mereka, dan sumber dayanya yang melimpah merupakan salah satu alasan penting untuk ini.

Komponen Anggaran Produksi dan Dampak yang Ditimbulkan Secara langsung

Bagian ini membahas hasil diskusi dengan lima produser film. Karena aspek finansial produksi film bisa menjadi topik sensitif, kami sepakat untuk tidak mengungkapkan identitas mereka. Produser A, B, dan C, meski sudah membangun karir profesionalnya di Jakarta, berasal dari Yogyakarta dan sudah banyak memproduksi film di daerah tersebut. Sedangkan produser D dan E bukan berasal dari Yogyakarta tetapi memiliki produksi lokal yang signifikan dalam portofolionya. Meskipun rencana awalnya adalah mengumpulkan data anggaran mengenai berbagai proyek film, tidak mudah bagi produser untuk mendiskusikan rencana keuangan mereka. Karena anggaran film yang bervariasi, beberapa produser menawarkan angka rata-rata dari produksi mereka di Yogyakarta sebelumnya. Saya menyesuaikan daftar setelah menerima lebih banyak masukan dari produser lain.

Anggaran produksi film tidak mengikuti formula tetap, dan setiap film unik. Setiap departemen membuat kalkulasi anggaran khusus, dan departemen ini memiliki jatah yang berbeda (dan bervariasi dari film ke film) dari total anggaran. Karena itu, saya langsung setuju ketika produser pertama yang saya wawancarai mengusulkan agar saya membuat perhitungan yang berbeda untuk film-film dengan budget kecil, menengah, dan besar (akan kita bahas di bawah). Beberapa komponen dipengaruhi secara signifikan oleh anggaran yang lebih besar, termasuk lokasi (film yang mahal dapat memiliki lebih banyak lokasi syuting) atau pemain (film kolosal dapat menggunakan ratusan aktor tambahan; film yang ditujukan untuk remaja dapat memiliki bintang pop populer; film drama dapat memiliki aktor pemenang penghargaan). Komponen lain tidak terlalu terpengaruh oleh anggaran yang lebih besar, termasuk biaya kru, peralatan, transportasi, dan katering (karena komponen ini tidak meningkatkan persentase dari total anggaran). Selain itu, penting juga untuk diperhatikan bahwa film dengan skala produksi yang serupa pun dapat menggunakan anggarannya secara berbeda, tergantung genre atau gayanya. Misalnya, film periode (yaitu film dengan latar waktu sejarah tertentu) akan menggunakan lebih banyak anggarannya untuk artistik dan kostum, sementara film aksi mungkin akan menggunakan lebih banyak anggarannya untuk efek khusus dan variasi kerja kamera.

Produser A mengungkapkan dari pengalamannya, ketika sebuah perusahaan yang berbasis di Jakarta memilih untuk membuat film dengan anggaran menengah hingga tinggi di Yogyakarta, sekitar lima puluh persen dari anggaran produksi dihabiskan di lokasi syuting. Lima puluh persen yang tersisa di Jakarta lebih mudah diperkirakan: "Katakanlah sepuluh persen untuk pasca (-produksi), dua puluh persen untuk kru, sepuluh persen untuk aktor yang berbasis di Jakarta, dan sepuluh persen untuk dukungan di Jakarta. Sekitar lima puluh persen yang dihabiskan di area syuting digunakan untuk pemeran pendukung, katering, hotel, agensi, kru lokal, dan transportasi. Karena itu, biaya syuting (akan dihabiskan) di Jogja" (wawancara, 4 Agustus 2019). Di sini dia mengingatkan saya bahwa perkiraan sederhana ini akan berubah, tergantung skala dan bentuk produksinya.

Sejak saat itu, saya membahas detailnya tidak hanya dengannya, tapi juga dengan produser lain. Untuk itu, bagaimanapun, perlu dilakukan perhitungan berdasarkan anggaran yang berbeda, sehingga teridentifikasi tiga kategori. Film dengan anggaran lebih dari Rp 10 miliar (USD 635.000) dianggap film mahal; mereka yang memiliki anggaran antara Rp 5 hingga 10 miliar dianggap kelas menengah;

dan yang bujetnya kurang dari Rp 5 miliar (USD 372.500) adalah film bujet kecil. Dalam konteks Indonesia, film layar lebar harus menghabiskan setidaknya Rp 3 miliar untuk memastikan kualitas yang sesuai, dan sangat sedikit yang menghabiskan lebih dari Rp 15 miliar (USD 1.000.000) karena jumlah layar bioskop yang tidak terlalu banyak membatasi potensi keuntungan. Hingga akhir 2019, Indonesia memiliki 2.110 layar di 508 bioskop (filmindonesia.or.id); jumlah ini menurun pada akhir tahun 2020, karena sejumlah bioskop harus ditutup sementara atau permanen akibat pandemi COVID-19.

Seperti disampaikan Produser A, beberapa komponen anggaran sebagian besar dihabiskan di luar lokasi syuting. Ketika sebuah film digagas oleh perusahaan dari luar Yogyakarta, seperti yang ada di Jakarta, kemungkinan besar setidaknya sebagian anggaran dibelanjakan di area sekitar kantor pusat; ini biasanya mencakup biaya pra-produksi, biaya sewa peralatan, pembayaran untuk aktor dan kru yang berbasis di Jakarta, tiket pesawat, dan biaya pasca produksi. Lebih rinci, (1) kegiatan kantor praproduksi (rekrutmen, rapat, penelitian dan survei, penulisan naskah, desain artistik/ kostum, perencanaan tata rias), (2) persewaan peralatan, (3) biaya kru di Jakarta, (4) honor pemain/aktor yang berbasis di Jakarta, (4) pembelian tiket pesawat, dan (5) kegiatan pascaproduksi (penyuntingan, pencampuran suara, koreksi warna, produksi kopi film).

Pada dasarnya praproduksi adalah fase ketika produser, sutradara, dan penulis naskah merencanakan proyek, menulis naskah, mempekerjakan kepala departemen, dan bertukar pikiran, serta periode berikutnya ketika mereka merancang artistik, dekorasi, dan kostum, dan merencanakan penataan rias. Semua proses ini cenderung terjadi di sekitar kantor pusat perusahaan, memudahkan berkoordinasi bagi sutradara dan para kepala departemen.

Sementara perusahaan film besar cenderung menyewa alat produksi dari perusahaan di Jakarta, karena perusahaan rental di lapangan mungkin kekurangan peralatan yang memenuhi standar industri. Meski beberapa perusahaan rental di Yogyakarta menawarkan perlengkapan yang memadai, namun beberapa perusahaan lain adalah cabang dari perusahaan penyewaan alat yang berbasis di Jakarta, yang harus tetap mendatangkan perlengkapan dengan kualitas terbaik dari Jakarta. Ini akan menjadi masalah lain bagi komisi film daerah, karena memastikan bahwa perusahaan lokal dapat menyediakan peralatan dapat mengurangi biaya transportasi.

Mengenai aktor dan kru, jelas bahwa keputusan menggunakan pemeran yang berbasis di Jakarta dibuat untuk memastikan produksi mendapatkan yang terbaik dalam bisnisnya. Ketersediaan aktor dan kru lokal juga memengaruhi biaya tiket pesawat. Dalam kasus Yogyakarta, semakin banyak talenta dan kru lokal yang telah mendapatkan reputasi nasional, dan ini membantu industri film lokal untuk berkembang; Adanya sekolah film lokal dan festival film internasional juga mempengaruhi ketersediaan infrastruktur. Namun, perusahaan produksi yang berbasis di Jakarta biasanya memesan tiketnya dari agen perjalanan yang berbasis di Jakarta.

Di ujung satunya, ada juga persoalan pascaproduksi. Fase ini mengharuskan sutradara dan produser duduk bersama dengan editor dan kru terkait lainnya untuk menyelesaikan film, dan akan lebih mudah dan efisien bagi rumah produksi untuk menyelesaikan proses di dekat kantor mereka di Jakarta. Sedangkan untuk peralatan, sebagian besar perusahaan pascaproduksi yang paling baik melayani film panjang berlokasi di Jakarta. Pada catatan ini, menurut saya salah satu tugas terpenting komisi film lokal adalah memulai perusahaan pascaproduksi lokal, memperluas skala perusahaan persewaan peralatan lokal, dan mendorong pertumbuhan perusahaan film lokal.

Selanjutnya, penting untuk memperkirakan peran masing-masing komponen dalam anggaran film dari skala yang berbeda. Berdasarkan estimasi pertama Produser A, kami mendapatkan anggaran produksi "ideal" sebesar Rp 10 miliar (sekitar USD 635.000), termasuk: 5,5% untuk pra-produksi, 3,5% untuk sewa peralatan, 10% untuk yang berbasis di Jakarta biaya pemeran / aktor, 20% untuk biaya kru di Jakarta, 1% untuk tiket pesawat, dan 10% untuk pasca produksi. Sisa 50% dari anggaran, mungkin diasumsikan, dihabiskan di area produksi. Untuk ini, kami membuat daftar lain: 12,5% untuk lokasi, 6,5% untuk produksi artistik dan kostum, 7% untuk sewa mobil dan truk (dengan bensin), 6% untuk katering, 11,5% untuk biaya pemeran lokal, 1% untuk biaya kru lokal, dan 3,5% untuk akomodasi. Dari sini, kami memperkirakan bagian anggaran dari berbagai komponen film kelas menengah dan bawah.

Komponen dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, komponen dengan jumlah yang relatif tetap, yang persentase anggarannya menurun seiring dengan peningkatan total anggaran. Komponen dalam kategori ini termasuk sewa peralatan, pasca produksi, dan biaya kru lokal. Pembuatan film dasar membutuhkan kamera, mikrofon, dan pencahayaan, dan meskipun produksi skala besar memerlukan kit kamera yang lebih rumit, lebih banyak mikrofon, dan mungkin lebih banyak kit pencahayaan,

perbedaan antara produksi yang lebih kecil dan lebih besar relatif tidak signifikan. Kami memperkirakan, dalam konteks produksi film Indonesia, sewa peralatan membutuhkan 10% dari anggaran produksi kecil, 7% dari anggaran produksi tingkat menengah, dan 3,5% dari anggaran produksi besar. Tahap pascaproduksi, saatnya melakukan penyuntingan, *mixing*, dan koreksi dilakukan, serupa; produksi yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak rekaman, lebih banyak *mixing* dan revisi suara, serta pengaturan warna yang lebih detail, tetapi perbedaannya kecil. Kami memperkirakan bahwa pascaproduksi membutuhkan 13% anggaran produksi kecil, 12% dari anggaran produksi kelas menengah, dan 10% dari anggaran produksi besar. Kru lokal serupa sifatnya; produksi yang lebih besar membutuhkan lebih banyak kru lokal, tetapi mengingat selisih biaya antara kru lokal dan yang dipekerjakan di Jakarta, kami dapat memperkirakan bahwa persentase anggaran yang digunakan untuk biaya kru lokal berbanding terbalik dengan besarnya anggaran; mungkin memerlukan 28% dari anggaran produksi kecil, karena mereka tidak terlalu bergantung pada kru yang berbasis di Jakarta, 14% dari anggaran produksi kelas menengah, dan hanya 1% dari anggaran produksi besar (karena film semacam itu lebih bergantung pada kru yang berbasis di Jakarta). Katering juga serupa. Meskipun produksi yang lebih besar mungkin membutuhkan lebih banyak makanan dan minuman, persentase anggaran yang dialokasikan untuk katering menurun seiring dengan peningkatan ukuran produksi.

Kedua adalah komponen dengan porsi anggaran yang sama, berapa pun besarnya anggarannya. Praproduksi, tiket pesawat, produksi seni dan kostum, dan persewaan mobil (dengan bensin) semuanya cukup penting sehingga investasi tambahan meningkatkan jumlah yang dibelanjakan, tetapi tidak sampai meningkatkan bagian anggaran mereka secara berlebihan. Misalnya, untuk produksi yang lebih kecil diperkirakan 5,5% anggaran dialokasikan untuk tahap pra-produksi. Dengan investasi yang lebih besar, produser dapat memperkuat penelitian, menambah desainer, merevisi skrip, dan memperluas tugas tahap perencanaan lainnya. Namun, karena tarifnya tetap sama, porsi anggarannya tetap sama. Logika serupa berlaku dengan produksi set dan lemari pakaian, yang secara terus-menerus menyumbang sekitar 6,5% dari anggaran — tidak peduli ukuran produksinya. Jumlah yang dikeluarkan untuk tiket pesawat dan transportasi tetap sama, masing-masing sekitar 1% dan 7%.

Ketiga, komponen mahal, motivasi utama bagi produser ketika meningkatkan investasi: aktor dan pemain lain, kru yang berbasis di Jakarta, lokasi, dan akomodasi. Film kolosal dan periode mahal karena membutuhkan lebih banyak pemain (dan, secara implisit, lebih banyak kostum), serta sejumlah lokasi dan dekor; Film horor dan suspens, sementara itu, mungkin dapat menghemat anggaran karena hanya membutuhkan sedikit aktor, dan fokus mereka pada set interior yang dapat dibuat dalam , berarti mereka membutuhkan sedikit lokasi. Produksi film yang lebih mahal lebih suka mempekerjakan aktor terkenal, dan karenanya harus mendatangkan lebih banyak aktor dari Jakarta saat pengambilan gambar secara lokal. Menurut perkiraan kami, dan seperti yang dijelaskan oleh Produser A, biaya aktor dan pemain mewakili 2,5% dari anggaran untuk produksi kecil, 6% untuk produksi kelas menengah, dan 10% untuk produksi besar. Sedangkan komponen kru yang berbasis di Jakarta terdiri dari 0% anggaran untuk produksi kecil, 10% untuk produksi menengah, dan 20% untuk produksi besar. Pengeluaran untuk lokasi, kami perkirakan, mencakup 5% dari anggaran untuk film kecil, 9% untuk produksi kelas menengah, dan 12,5% untuk produksi besar. Akhirnya, perkiraan kami melihat akomodasi membutuhkan 2,5% dari film anggaran rendah, 3% dari produksi kisaran menengah, dan 3,5% dari produksi anggaran tinggi.

Tabel 1. Perkiraan biaya komponen produksi film, dalam prosentase dari total anggaran

Budget item		Film beranggaran kecil (dalam %)	Film beranggaran menengah (dalam %)	Film beranggaran tinggi (dalam %)
Pengeluaran di luar areal suting	Preproduksi	5.5	5.5	5.5
	Peralatan	10	7	3.5
	Honor aktor asal Jakarta	2.5	6	10
	Honor kru asal Jakarta	0	10	20
	Transportasi pesawat	1	1	1

	Pascaproduksi	13	12	10
	Lokasi	5	9	12.5
	Biaya artistik dan kostum	6.5	6.5	6.5
	Transportasi darat dan Bensin	7	7	7
	Katering	8	7	6
	Honor pemain/aktor lokal	9	10	11.5
	Honor kru lokal	30	16	3
	Akomodasi	2.5	3	3.5
	Total	100	100	100
	Total pengeluaran lokal	68	58.5	50

Mengulangi perkiraan kami untuk film dengan anggaran lebih besar, kami dapat melihat bahwa beberapa komponen tidak mempengaruhi ekonomi lokal sama sekali: 5,5% untuk pra-produksi, 3,5% untuk sewa peralatan, 10% untuk biaya bakat / aktor yang berbasis di Jakarta, 20% untuk biaya kru di Jakarta, 1% untuk tiket pesawat, dan 10% untuk pasca produksi. Sedangkan komponen yang secara langsung mempengaruhi perekonomian lokal adalah: 12,5% untuk lokasi, 6,5% untuk produksi seni dan kostum, 7% untuk transportasi (dengan bensin), 6% untuk catering, 11,5% untuk biaya bakat lokal, 3% untuk lokal. biaya kru, dan 3,5% untuk akomodasi.

Kami juga memiliki perkiraan untuk produksi film dengan anggaran menengah. Pengeluaran di luar daerah syuting yang tidak mempengaruhi ekonomi lokal termasuk 5,5% dari anggaran untuk pra-produksi, 7% untuk peralatan, 6% untuk biaya bakat yang berbasis di Jakarta, 10% untuk biaya kru yang berbasis di Jakarta, 1% untuk tiket pesawat, dan 12% untuk pasca produksi. Sedangkan dari komponen yang secara langsung mempengaruhi perekonomian lokal, lokasi menyumbang 9% dari anggaran; 6,5% lainnya digunakan untuk produksi seni dan kostum, 7% untuk transportasi (dengan bensin), 7% untuk catering, 10% untuk biaya pemain lokal, 16% untuk biaya kru lokal, dan 3% untuk akomodasi.

Terakhir, untuk film anggaran rendah yang diprakarsai oleh perusahaan film berbasis di Jakarta, komponen yang tidak secara langsung mempengaruhi perekonomian lokal meliputi: 5,5% anggaran untuk pra-produksi, 10% untuk peralatan, 2,5% untuk biaya aktor di Jakarta, kurang lebih 0% untuk kru yang berbasis di Jakarta, 1% untuk tiket pesawat, dan 13% untuk pasca produksi. Sedangkan komponen yang secara langsung mempengaruhi perekonomian lokal meliputi lokasi (5%), produksi seni dan kostum (6,5%), transportasi (7%), catering (8%), biaya pemain lokal (9%), biaya kru lokal (30%), dan akomodasi (2,5%).

Secara keseluruhan, kita bisa optimis bahwa produksi film di Jakarta menghabiskan sekitar 50–68% dari total anggarannya untuk perekonomian daerah. Untuk mendapatkan akses dana tersebut, pemerintah daerah harus bersaing dengan pemerintah daerah lain untuk menarik produksi. Selain itu, produksi ini memiliki efek pengganda; pengeluaran mereka menciptakan gelombang pengeluaran kedua, seperti yang akan dibahas di bagian berikut.

Komponen Anggaran Produksi dan Efek Tidak Langsung yang Ditimbulkannya

Saat menghitung efek tidak langsung dari produksi film, kami tidak akan mengacu pada praproduksi, persewaan peralatan, biaya pemain/aktor yang berbasis di Jakarta, biaya kru yang berbasis di Jakarta, tiket pesawat, atau pascaproduksi. Alih-alih, kami akan fokus pada komponen anggaran yang menghabiskan uang di area syuting: lokasi, seni, produksi kostum (termasuk make-up), transportasi (sewa mobil dan truk, termasuk bensin), catering, biaya aktor / aktor lokal, biaya kru lokal, dan akomodasi. Kami akan memulai diskusi kami dengan anggaran lokasi.

A. Lokasi: 10% Pengaruh Tidak Langsung

Anggaran lokasi film memiliki efek ekonomi langsung dan tidak langsung: ini berpengaruh langsung ketika uang digunakan untuk menyewa properti dari pemilik lokal (untuk digunakan sebagai lokasi, set, dll.). Ini juga memiliki efek tidak langsung ketika pemilik properti membayar pihak ketiga untuk memelihara aset mereka. Karena banyak properti pribadi memerlukan perawatan terus-menerus, kami dapat optimis dan mengatakan bahwa 100% anggaran untuk sewa lokasi pada akhirnya akan digunakan untuk pemeliharaan. Di sisi lain, kita bisa realistis dan melihat pemeliharaan dilakukan sebelum dan sesudah pengambilan gambar, sehingga membatasi efek tidak langsung menjadi hanya 10%.

Beberapa daerah di Yogyakarta biasa digunakan sebagai lokasi syuting. Sebagian besar adalah bangunan tua dan arsitektur peninggalan masa lalu, keduanya sesuai dengan kebutuhan film-film period atau yang berlatar zaman dulu. Lainnya termasuk rumah umum, ruang publik, rumah sakit, dan sekolah yang terlihat khas Indonesia. Wawancara dengan produser serta observasi di Yogyakarta mengungkap informasi lebih lanjut mengenai lokasi film. Produser A, B, dan C percaya bahwa Yogyakarta adalah lokasi pengambilan gambar yang ideal untuk perusahaan film yang berbasis di Jakarta karena dua alasan utama: (1) lalu lintas yang relatif lengang dibandingkan dengan Jakarta, sehingga memungkinkan produksi untuk mengambil gambar di dua atau lebih lokasi dalam satu hari, dan ini dapat mengurangi anggaran yang diperlukan, dan (2) kru dan bakat berkualitas baik tersedia secara lokal, yang berarti bahwa produksi dapat menghemat uang untuk akomodasi. Produser D agak berbeda. Dia yakin bahwa kebanyakan tempat lain di luar Jakarta juga sama bagusnya, dan dia memilih untuk syuting di Yogyakarta beberapa kali hanya karena ceritanya berlatar di Yogyakarta. Meski demikian, beberapa produksi telah menggunakan rumah non-tradisional yang banyak terdapat di Yogyakarta untuk digunakan sebagai set yang menggambarkan tempat-tempat yang jauh seperti kota di Sulawesi atau Nusa Tenggara.

B. Kebutuhan Artistik dan Kostum: 75% Efek Tidak Langsung (100% artistik + 40% kostum: 2)

Item anggaran ini hampir tidak berpengaruh langsung, karena biasanya produser tidak menugaskan perusahaan yang berbasis di Jakarta untuk produksi seni dan kostum, sementara pembayaran untuk penata artistik film, perancang kostum, dan penata rias (serta mereka yang berada di bawah pengawasan mereka) sudah termasuk dalam biaya kru. Anggaran departemen seni, bagaimanapun, memiliki efek tidak langsung karena produksi perlu membeli bahan untuk pembangunan tempat. Kami yakin 100% bahan-bahan ini dibeli secara lokal, sehingga mengurangi biaya transportasi.

Perhitungan berbeda untuk departemen penataan busana atau kostum. Seorang desainer kostum yang tinggal di Yogyakarta menjelaskan bahwa dia menghabiskan anggarannya untuk membeli bahan dan membayar para penjahit yang ditugaskan untuk memproduksi kostum. Dia mengatakan bahwa dia biasanya membeli material di Jakarta dan Yogyakarta, dan memiliki penjahit tetap di kedua kota tersebut, untuk memastikan bahwa dia bisa menyelesaikan desain selama masa pra-produksi (yang sebagian besar dihabiskan di Jakarta) dan selama produksi di Yogyakarta. Dia memperkirakan bahwa 60% dari pengeluarannya dilakukan di Jakarta, yang menawarkan lebih banyak pilihan untuk material dan harga yang lebih rendah. 40% sisanya dihabiskan secara lokal. Namun, semuanya tergantung kebutuhan produksi. Saat mencari kain tenun, Yogyakarta menawarkan harga yang lebih murah. Dia menekankan bahwa bekerja dengan pasar dan penjahit di dua kota adalah keuntungan baginya karena dia pernah tinggal di kedua kota tersebut dan akrab dengan konteks masing-masing.

Sementara itu, pembelian make-up juga harus dimasukkan di sini. Namun, secara problematis, untuk sebagian besar film — kecuali untuk genre horor, fiksi ilmiah, dan fantasi, yang membutuhkan riasan khusus — pengeluaran untuk pembelian riasan tidak signifikan dibandingkan dengan belanja seni dan pakaian. Khusus terkait masalah efek tidak langsungnya, make-up paling banyak dibeli di Jakarta, sehingga efek tidak langsungnya di tingkat lokal minimal.

C. Transportasi (Sewa Mobil dan Truk): 30% Efek Tidak Langsung (28,5% sewa + 1,5% bahan bakar)

Anggaran transportasi produksi film memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung: berpengaruh langsung pada perusahaan persewaan mobil, dan berpengaruh tidak langsung melalui biaya yang dibayarkan oleh perusahaan persewaan kepada pengemudi dan pemilik SPBU. Dari wawancara dengan koordinator transportasi berpengalaman dan pemilik perusahaan persewaan mobil di Yogyakarta, saya menemukan bahwa menghitung dampak tidak langsung pada pengemudi cukup sederhana: perusahaan produksi film cenderung menyewa minibus, dengan biaya sekitar Rp 700.000 per hari (termasuk

pengemudi dan bensin). Sopir dibayar Rp 200.000, sekitar 28,5% dari biaya sewa; Jadi, pungutan-pungutan ini merupakan efek tidak langsung dari produksi film terhadap pengemudi.

Berapa banyak mobil yang disewa produksi film setiap hari selama pengambilan gambar? Berapa hari mereka membutuhkan mobil, truk, dan kontainer? Jawabannya tentu tergantung besar kecilnya produksinya. Saat saya mengunjungi lokasi syuting di kawasan Kaliurang sekitar pukul 21.00, saya tidak dapat menemukan lokasi tersebut; Saya akhirnya mendapat indikasi yang jelas ketika melihat sejumlah mobil terparkir di depan salah satu rumah. Saya menghitung ada sekitar dua puluh lima mobil yang diparkir dari berbagai jenis. Kebanyakan minibus kecil, dengan kapasitas delapan penumpang; Ada juga beberapa sedan, beberapa mobil boks, dan beberapa truk kecil. Belakangan saya mengetahui bahwa pengemudi mobil-mobil ini telah tidur di bahu jalan, menunggu pengambilan gambar selesai, saat mereka harus mengemudi lagi.

Sedangkan dari Rp 700.000 yang dikeluarkan untuk sewa minibus, Rp 200.000 (28,5%) dialokasikan untuk bensin. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar dari uang ini tidak tinggal lokal, tetapi masuk ke perusahaan perminyakan yang berbasis di Jakarta dan dengan demikian tidak dapat secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi lokal. Di lingkungan ritel bahan bakar Indonesia, pemilik SPBU hanya menerima 5% keuntungan dari penjualan mereka (lihat Adriawan, 2019, atau Daeng, 2017); Dengan demikian, mereka hanya menerima sekitar 1,5% dari anggaran transportasi produksi film. Dari sini, pemilik SPBU dapat membayar pekerjanya, dan ini memberikan efek tidak langsung lebih lanjut pada perekonomian lokal.

D. Katering: 50% Efek Tidak Langsung

Anggaran katering juga memiliki efek langsung dan tidak langsung: memiliki efek langsung pada perusahaan katering, dan memiliki efek tidak langsung melalui pembelian bahan dan dari pembayaran gaji pekerja oleh perusahaan. Bisnis kuliner bisa sangat menguntungkan, dan meskipun pendapatan bervariasi antar perusahaan, margin keuntungan diharapkan 50–70% (Ayodya, 2013: 51–54; Ayodya, 2016: 193–196). Karena beberapa jasa katering bekerja dengan produksi film di Yogyakarta, saya memilih menggunakan margin keuntungan yang lebih kecil untuk menonjolkan persaingan di antara mereka.

Menyediakan makanan dan penyegaran sangat penting untuk pengambilan gambar. Selama kunjungan saya ke tempat produksi di Kaliurang, di kawasan Kraton, atau di Studio Alam Desa Gamplong, ada lebih dari seratus orang di lokasi syuting, termasuk anggota kru, aktor, agen mereka, dan anggota keluarga. Mereka menunggu dengan sabar di bawah tenda bazar, berukuran kira-kira empat kali empat meter, yang awalnya ditujukan untuk sutradara dan anggota kru penting lainnya. Kru dapur terus berjalan berkeliling, menawarkan makanan dan minuman panas kepada mereka yang hadir. Makanan ditawarkan kepada semua orang di lokasi syuting, termasuk orang-orang yang tidak termasuk dalam tim produksi film. Makanan seperti itu diperlukan agar kerumunan bisa tetap tenang terkendali.

E. Pemain / Aktor Lokal: 0% Efek Tidak Langsung.

Anggaran produksi film untuk bakat lokal memiliki efek langsung pada aktor, serta pada agensi pemain. Dalam wawancara saya dengan seorang koordinator pemain, saya menemukan bahwa satu pengambilan gambar film kolosal di Yogyakarta telah menggunakan 90% pemain lokal, dengan anggaran Rp 700 juta (USD 45.000) untuk mereka. Biaya individu bervariasi antara Rp 150.000 (USD 10) dan Rp 50 juta (USD 3000).

Di Yogyakarta, ada figuran yang mata pencahariannya bergantung pada industri film. Seperti yang dijelaskan oleh kordinator pemain, "[m]ereka bisa ke mana-mana. Setelah di sini, mereka bisa pergi ke tempat lain dengan rate yang berbeda. Mereka kesusahan, tapi bertahan" (wawancara, 7 Agustus 2019). Di lokasi syuting, tidak ada yang mengeluh tentang apapun; memang, walau suasana sebuah pengambilan gambar film terasa seperti suasana acara pesta di desa, situasinya sedikit berbeda dengan kehidupan desa sehari-hari. Beberapa orang sibuk bekerja. Banyak lainnya, seperti para aktor, yang menunggu giliran (serta teman dan anggota keluarga mereka), hanya duduk-duduk di bangku plastik, mengobrol satu sama lain, mengutak-atik gadget mereka, atau mengomentari rekaman mereka sebelumnya. Tidak ada truk trailer besar bagi pemain, tidak ada permintaan khusus dari para bintang. Mereka kembali ke lokasi syuting ketika kru memanggil nama mereka, dan ketika mereka sedang istirahat, mereka bergabung dengan grup.

F. Biaya Kru Lokal: 0% Efek Tidak Langsung

Seperti halnya *talent* / aktor lokal, anggaran produksi film untuk kru lokal berdampak langsung pada kru itu sendiri, dan tidak memiliki efek tidak langsung. Menurut buku "*Mapping Filmmakers in Yogyakarta 2015*" (Suwanto et al., 2015), yang diterbitkan oleh Sie Film pada Dinas Kebudayaan Yogyakarta memberikan gambaran dasar tentang kegiatan dan bisnis perfilman di Yogyakarta. Kru lokal disiapkan melalui sekolah film, festival film internasional, workshop, seminar, bahkan pemutaran film dan diskusi yang melibatkan sineas, aktivis, akademisi, dan birokrat di Yogyakarta.

G. Akomodasi: 73% Pengaruh Tidak Langsung

Anggaran produksi film untuk akomodasi juga memiliki dampak langsung dan tidak langsung: berdampak langsung pada hotel / hostel, dan pengaruh tidak langsung melalui pembayaran pekerja hotel, pengolah makanan dan minuman, dan investasi awal (dalam bentuk pengembangan properti). Hotel diperkirakan memiliki margin keuntungan sebesar 26,67% (Sumarsono, 2014, hal. 30); Saya akan membulatkan ini menjadi 27% untuk keperluan makalah ini. Dengan demikian, dampak tidak langsung dari anggaran akomodasi film diperkirakan mencapai 73%.

Ringkasan

Pengaruh tidak langsung dari setiap komponen produksi disajikan di bawah ini:

Table 2. Estimasi efek berlapis (sebagai persentase dari total dan pengeluaran lokal)

<i>Budget item</i>	<i>indirect effect (in %)</i>	<i>low-budget film production (in %)</i>	<i>indirect effect of low-budget film production (in %)</i>	<i>mid-range film production (in %)</i>	<i>indirect effect of mid-range film production (in %)</i>	<i>higher-budget film production (in %)</i>	<i>higher-budget film production (in %)</i>
Lokasi	10	5	0.5	9	0.9	12.5	1.25
Biaya artistik dan kostum	75	6.5	4.875	6.5	4.875	6.5	4.875
Transportasi darat dan Bensin	30	7	2.1	7	2.1	7	2.1
Katering	50	8	4	7	3.5	6	3
Honor pemain/aktor lokal	0	9	0	10	0	11.5	0
Honor kru lokal	0	30	0	16	0	3	0
Akomodasi	73	2.5	1.825	3	2.19	3.5	2.55
<i>Total % of local spending</i>		68		58.5		50	
<i>Total Indirect Effect (as % of Total Budget)</i>			13.3		14.465		13.775
<i>Total Indirect</i>			19.56		24.73		27.55

<i>Effect (as % of Local Spending)</i>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Dengan demikian, kami dapat memperkirakan bahwa produksi film di Yogyakarta memiliki efek pengganda sebesar 13,3–14,47% dari total anggaran, dan 19-28% dari anggaran belanja daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanyaan penelitian pertama mencari cara untuk memperkirakan bagaimana produksi film dari skala yang berbeda — misalnya, film dengan anggaran lebih rendah, menengah, dan tinggi — dan komponennya dapat memiliki efek ekonomi pada penduduk setempat. Diskusi dan perkiraan dengan produser menghasilkan tiga tingkat investasi yang berbeda: film anggaran tinggi, dengan investasi lebih dari Rp 10 miliar (USD 635.000); film kelas menengah, dengan investasi antara Rp 5 hingga 10 miliar, dan film-film anggaran rendah, dengan investasi kurang dari Rp 5 miliar (USD 372.500). Masing-masing memiliki logikanya sendiri-sendiri mengenai cara produksi film yang paling menguntungkan. Pertanyaan selanjutnya mengeksplorasi persentase anggaran produksi film yang dibelanjakan secara lokal. Untuk film anggaran rendah, 68% anggaran dibelanjakan secara lokal; Oleh karena itu, film dengan anggaran Rp 4 miliar diperkirakan membelanjakan dana di tingkat lokal sebesar Rp 2,72 miliar. Sementara itu, produksi kelas menengah menghabiskan sekitar 58,5% dari anggaran mereka secara lokal; Dengan demikian, film dengan anggaran Rp 7 miliar akan menyumbang Rp 4,095 miliar bagi perekonomian daerah. Produksi yang lebih besar memiliki tingkat kontribusi lokal sebesar 50%; Dengan demikian, film dengan anggaran Rp 10 miliar akan berkontribusi minimal Rp 5 miliar bagi perekonomian daerah.

Ada cara untuk meningkatkan pengeluaran lokal dalam produksi film: pemerintah daerah dapat meminta produser untuk memastikan lebih banyak proses produksi diselesaikan secara lokal; Hal ini tidak hanya menguntungkan daerah tuan rumah dengan meningkatkan belanja daerah, tetapi juga dapat menguntungkan produser, karena biaya menyelesaikan tugas produksi secara lokal dapat mengurangi anggaran mereka lebih banyak. Untuk lebih memikat produser film, pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya seperti penyewaan peralatan, mempersiapkan lebih banyak aktor dan kru, dll.

Pertanyaan ketiga terkait dengan efek berlapis dari produksi film (yaitu efek tidak langsungnya terhadap ekonomi lokal). Diperkirakan bahwa efek berlapis ini menyumbang 13,775% dari total anggaran untuk film anggaran tinggi, 14,465% untuk film kelas menengah, dan 13,3% untuk film anggaran rendah. Ini setara dengan 27,55% dari seluruh pengeluaran di daerah untuk film anggaran tinggi, 24,73% untuk film kelas menengah, dan 19,56% untuk film anggaran rendah. Ini tidak termasuk transaksi yang disebabkan oleh masuknya orang tambahan karena produksi film, atau pariwisata yang disebabkan oleh produksi film.

Dibandingkan dengan temuan Fieldman di Massachusetts Barat (yaitu bahwa efek tidak langsung dari produksi film mencapai 63%), angka 13-14% dari total anggaran atau 19-28% dari total pengeluaran lokal mungkin tampak rendah. Namun, semoga tulisan ini dapat membantu pemerintah, dewan film, dan komisi film lokal untuk fokus pada bidang yang paling menjanjikan untuk dikembangkan. Salah satunya adalah departemen artistik dan kostum, yang dampak tidak langsungnya dapat meningkat hingga 100% jika peraturan mewajibkan penata artistik dan penata busana untuk menghasilkan karya mereka dengan sumber daya lokal. Pemerintah daerah juga dapat mensubsidi beberapa bidang untuk menarik lebih banyak produksi film dengan berfokus pada tiga bidang di mana efek penggandanya paling besar: transportasi, katering, dan akomodasi. Meskipun subsidi tersebut secara langsung akan menguntungkan produser dan pemilik layanan, subsidi tersebut juga akan berdampak tidak langsung namun nyata pada penduduk setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, Fery. (2019). *Berapa Biaya Franchise Pertamina Pom Bensin, Balik Modal Cepat?* Paper.id. Retrieved from <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/franchise-pertamina-pom-bensin/> on 19 December 2019.
- Ayodya, Wulan (2016). *Business Plan Usaha Kuliner Skala UMKM*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ayodya, Wulan. (2013). *Kursus Singkat Usaha Aneka Katering Laris Manis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- BEKRAF. (2017). *Shooting Lancar, Daerah Tenar*. Jakarta: BEKRAF.
- Daeng, Dono Akbar M. (2017). *Jalan Berliku Jadi Kaya Sebagai Juragan SPBU*. Tirto.id. Retrieve from <https://tirto.id/jalan-berliku-jadi-kaya-sebagai-juragan-spbu-cB4c> on 19 December 2019.
- Economics Center for Research and Consulting, University of Cincinnati (2018). *The Economic Impact and Related Community Benefits of the Film Industry on the Cincinnati Metropolitan Area*. Cincinnati: Economics Center for Research and Consulting, University of Cincinnati.
- Fieldman, Rick. (2015). *When Movie Making Comes to Town: An Economic Impact Analysis and Strategies for Development*. Western Massachusetts: Berkshire Film and Media Collaborative.
- Heeren, Katinka van. (2012). *Contemporary Indonesian Film: Spirit of Reform and Ghost from the Past*. Leiden: KITLV Press.
- Hoffmann, Nicole B. (2015). *On-Location Film-Induced Tourism: Success and Sustainability*. Pretoria: University of Pretoria, Master Thesis.
- Klowden, Kevin, Anusuya Chatterjee, and Candice Flor Hynek (2010). *Film Flight: Lost Production and Its Economic Impact on California*. Santa Monica: Milken Institute.
- Komalawati, Euis. (2017). *Industri Film Indonesia: Membangun Keselarasan Ekonomi Media Film dan Kualitas Konten*. Lugas, Jurnal Komunikasi. Vol. 1, No. 1.
- Mayer, Vicky. (2017). *Almost Hollywood, Nearly New Orleans: The Lure of the Local Film Economy*. Oakland: University of California Press.
- Munaf, Triawan (2017). "Kata Pengantar", dalam *Shooting Lancar Daerah Tenar: Pedoman Pembentukan Komisi Film Daerah*. Jakarta: BEKRAF
- Nugroho, Garin, and Dyna Herlina S. (2015). *The Crisis and Paradox of Indonesian Film (1900–2012)*. Yogyakarta: Office of Culture, Special Region of Yogyakarta.
- Ortner, S. (2013). *Not Hollywood: Independent Film at the Twilight of the American Dream*. Durham: Duke University Press.
- Servia, Chand Parwez. (2017). "Kata Pengantar", dalam *Shooting Lancar Daerah Tenar: Pedoman Pembentukan Komisi Film Daerah*. Jakarta: BEKRAF
- Sumarsono, Dicky. (2014). *Dahsyatnya Bisnis Hotel di Indonesia: Smart Strategy, High Revenue*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistianti, Endah W. (2017). "Kata Pengantar", dalam *Shooting Lancar Daerah Tenar: Pedoman Pembentukan Komisi Film Daerah*. Jakarta: BEKRAF
- Suwarto, Dyna Herlina, Firly Annisa, Kurniawan A. Saputro, and Zaki Habibi (2015). *Mapping Filmmakers in Yogyakarta 2015*. Yogyakarta: Office of Culture, Special Region of Yogyakarta.

Telles, Jason Paolo. (2020, July–December). *Local Film Production in the Philippine Cordillera: Processes, Motivations, and Constraints*. *Plaridel*, Vol. 17, No. 2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah